

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BELANJA MODAL DALAM
MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA
BENGKULU PROVINSI BENGKULU**

Rydo Tama

NPP. 29.0514

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Program Studi Keuangan Publik

Email: ridotama47@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on implementing the Effectiveness of Capital Expenditure during the Covid-19 Period, which affects all areas of life in society. **Purpose:** The purpose of this research is to see how effective capital expenditure is during the Covid-19 pandemic and before the entry of this pandemic into Indonesia. **Method:** This study uses a qualitative research type by conducting a study on OPD that manages local government finances. The data used is taken from the Regional Financial and Asset Management Agency as the financial manager of the regional government. **Results:** To deal with this handling, various policies related to changes in the budget, including capital expenditures, were carried out. Developed development plans and budgets previously intended to carry out development diverted to deal with this pandemic. **Conclusion:** The results of the study show significant differences in capital expenditures after and before the entry of the covid-19 pandemic and why capital expenditures are ineffective. Using the Gibson Effectiveness Toeri which explains the purpose of control, sharing strategies, analysis process and policy formulation, planning, programming, availability of facilities and infrastructure, monitoring system and.

Key Word: Capital expenditures, Budget, Pandemic Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis fokus pada pelaksanaan Efektivitas Belanja Modal Pada Masa Covid-19 yang mempengaruhi segala bidang kehidupan di masyarakat. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini melihat bagaimana efektifnya belanja modal selama masa pandemi Covid-19 dan sebelumnya masuknya pandemi ini ke Indonesia. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan studi pada OPD yang mengelola keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah. **Hasil dan Temuan:** untuk mempercepat penanganan ini dilakukanlah berbagai kebijakan yang menyangkut perubahan anggaran termasuk pada belanja modal. Rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah dan anggaran yang sebelumnya ditujukan untuk melaksanakan pembangunan yang dialihkan untuk menangani pandemi ini. **Kesimpulan :** Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada belanja modal setelah dan sebelum masuknya pandemi covid-19 dan mengapa terjadi tidak efektifnya belanja modal. Menggunakan Toeri Efektivitas dari Gibson yang menjelaskan kejelasan tujuan, kejelasan strategi, proses analisis dan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan program, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian.

Kata Kunci : Belanja Modal, Anggaran, Pandemi Covid-19

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 sudah ada sejak akhir tahun 2019. Melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020, wabah virus corona (Covid-19) ditetapkan sebagai Pandemi Global (WHO 2020). Covid 19 berdampak luas bagi kesehatan. Pada 7 Oktober 2020, jumlah negara yang telah mengkonfirmasi kasus Covid-19 sebanyak 235, rincian sebagai berikut 1.044.269 orang meninggal dan 35.659.007 positif di seluruh dunia (WHO 2020). Sementara pada tanggal yang sama di Indonesia, 11.472 orang meninggal dunia dan 315.714 orang terkonfirmasi positif (Gugus Tugas Covid 2020). Jumlah orang yang terjangkit Covid-19 terus meningkat setiap harinya dengan peningkatan sekitar 100 kasus per hari. Covid19 telah merambah seluruh wilayah Indonesia (Lestyowati & Kautsarina, 2020).

Salah satu dampak adanya Covid-19 yaitu terjadinya perubahan anggaran. Menurut Andriana dalam Suhendro (2017) anggaran Anggaran adalah rencana bisnis jangka pendek, biasanya 12 bulan, dapat berisi rekonsiliasi rinci dari strategi perusahaan yang diharapkan selama periode anggaran. Pada ruang lingkup pemerintah ataupun sektor publik, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai sasaran atau target yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Anggaran di sektor publik atau publik adalah masalah yang kompleks, tidak seperti sektor swasta yang tujuan pertamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, anggaran juga bersifat rahasia, tetapi tidak dengan anggaran sektor publik. Anggaran pemerintah bisa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dapat termasuk rencana

pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan di suatu daerah untuk satu tahun. (Khusaini 2019:90)

Adanya pemotongan anggaran Belanja Daerah untuk dialokasikan pada percepatan penanganan Covid-19 menjadi tantangan yang besar bagi Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang muncul pada saat pengurangan, yang umumnya juga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tindakan oleh pejabat daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan perang melawan Covid-19 sekaligus memenuhi kebutuhan belanja.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adanya pemotongan anggaran Belanja Daerah untuk dialokasikan pada percepatan penanganan Covid-19 menjadi tantangan yang besar bagi Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang muncul pada saat pengurangan, yang umumnya juga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tindakan oleh pejabat daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan perang melawan Covid-19 sekaligus memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Kota Bengkulu yang terkena dampak pada perubahan anggaran setelah Pandemi Covid-19 masuk. Pada tahun 2020 terjadi perubahan belanja daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pada saat pandemi Covid-19 berlangsung Pemerintah Bengkulu mendapat dana terkait penggunaan dan percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp 121.000.000.000,00.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Kota Bengkulu pada belanja modal pada tahun 2018 efektifitas pada tahun 2018 dapat dikatakan efektif, namun berbeda tahun 2019, ratio hanya mencapai 46% dan dapat dikatakan belum efektif. Sedangkan, pada tahun 2020 dapat dikatakan kurang efektif karena hanya mencapai rasio 64% dan dikatakan kurang efektif.

Dana yang dialihkan menyebabkan pengadaan Belanja Modal pada OPD terhambat. Pemerintah Kota Bengkulu sudah mengalokasikan Anggaran untuk Percepatan Penanganan Covid-19 sebesar Rp 204.541.000.000,00 dan saat ini dana itu sudah terpakai Rp 79.992.000.000,00 telah digunakan Dinas Sosial, Damkar, Dishub, RSHD, BPBD, Satpol-PP, Inspektorat, dan Dinkes.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu pada (Muhammad Herman Djaja, 2015) pada Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Kecamatan Pamekasan dan mendapat hasil Kontribusi belanja langsung dari tahun 2009-2010 masih kurang kecuali pada Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai 50% dan dapat dikatakan efektif. Julita (2013) tentang Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan didapatkan Tingkat efektivitas Pada Tahun 2009-2013 keseluruhannya tidak efektif dari tahun 2009-2013 Keseluruhan tidak

Efektif. Serta pada Kabupaten Musi Banyuasin Rano Asoka (2019) Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dalam tingkat efektivitas pengelolaan laporan realisasi anggaran belanja modal di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dari 2016-2018 dapat dikatakan efektif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Rano Asoka (2019) bertempat di Musi Banyuasin dan Julita (2013) di Sumatera Utara. Sementara penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dengan metode dekritif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sehingga ada beberapa kebaruan yaitu dari segi lokus, metode penelitian, dan permasalahan yang diselesaikan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

II. Metode

Metode penelitian biasanya dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang berlangsung secara bertahap, dimulai dengan mendefinisikan suatu topik, mengumpulkan data dan menganalisisnya, untuk kemudian memperoleh pemahaman dan pemahaman tentang topik, gejala, atau masalah tertentu. (Raco, 2018)

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Creswell dalam (Raco, 2018) mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.

Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif Kualitatif (QD) adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif (Yuliani, 2018)

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi Covid-19 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Unsur efektivitas pada Gibson yang dikutip dari (Kurniawan, 2005:107) mengatakan “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”. Dalam masa pandemi Covid-19 pengelolaan keuangan terkhususnya pada belanja modal terjadi kendala karena tidak berjalan dengan efektif karena pengalihan anggaran untuk

percepatan penanganan Covid-19. Dalam pandangan Gibson terapat 7 faktor efektivitas yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian. Pada dimensi tujuan yang hendak dicapai dapat dikatakan belum efektif yang didasarkan rasio efektivitas hanya mencapai 46%. Pada indikator kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam pelaksanaan belanja modal Pemerintah Kota Bengkulu belum efektif. Dari indikator Proses Analisis dan Perumusan Kebijaksanaan yang Mantap efektivitas belanja modal Pemerintah Kota Bengkulu sudah efektif. Dari indikator Perencanaan Yang Matang dalam efektivitas belanja modal Pemerintah Kota Bengkulu sudah efektif. Dapat dilihat dari perencanaan yang di susun BPKAD Kota Bengkulu melalui renstra Pemerintah Kota Bengkulu. Indikator Penyusunan Program yang Tepat dalam efektivitas belanja modal Pemerintah Kota Bengkulu sudah efektif. Indikator Sarana dan Prasarana dalam efektivitas belanja modal Pemerintah Kota Bengkulu belum efektif yang diakibatkan dari *refocussing* anggaran. Dari indikator Sistem Pengawasan dan Pengendalian dalam efektivitas belanja modal Pemerintah Kota Bengkulu sudah efektif. dalam mengefektifkan pelaksanaan belanja modal dalam masa Pandemi Covid-19 akan dilaksanakan langsung oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini yaitu KPK.

3.2. Faktor penghambat Efektifitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi Covid-10 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kota Bengkulu telah memberikan upaya-upaya dalam rangka Pelaksanaan Belanja Modal Kota Bengkulu. Tetapi dalam pelaksanaannya perlu di dukung seperti alat-alat di lapangan, SDM, Ahli, dan anggaran yang menunjang segala bentuk kegiatan operasional dalam Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi Covid-19. Peneliti akan menjelaskan beberapa faktor yang ditemukan dalam permasalahan ini :

1. Perencanaan

Dalam pengelolaan keuangan baik di daerah maupun pusat pasti harus memiliki perencanaan yang begitu matang dan mempunyai proses yang panjang agar mendapat hasil yang maksimal.

2. Anggaran

Anggaran adalah faktor yang menimbulkan faktor-faktor lain dalam Pelaksanaan Belanja Modal. Anggaran untuk Belanja Modal yang telah disiapkan juga tidak bisa dilaksanakan serta direalisasi dengan efektif.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi yang telah melanda seluruh dunia serta Indonesia sendiri menjadi permasalahan untuk Pemerintah Indonesia sampai Pemerintah Daerah.

3.3. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengefektifkan Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

1. Tujuan

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel

2. Sasaran

- a) Rasio Kemandirian Keuangan Yang Dilegalisasi
- b) Presentase SILPA terhadap APBD
- c) Presentase Aset Daerah Yang Dilegalisasi

3. Strategi

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Arah Kebijakan

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan belanja modal dalam masa pandemi Covid-19 membuat banyak dampak dalam kinerja pada Pemerintah Daerah terkhususnya pada Pemerintah Kota Bengkulu. Penulis melihat terdapat program yang berkaitan dengan belanja modal tidak dapat terealisasi. BPKAD sebagai badan yang mengelola hal tersebut juga harus merubah prioritas anggaran yang digunakan untuk percepatan penanganan Covid-19. Masalah yang dihadapi seluruh dunia yaitu pandemi Covid-19 harus merubah fokus anggaran mereka ke percepatan penanganan Covid-19. Namun peneliti juga menemukan sebelum terjadi Covid-19 pada tahun 2019 pelaksanaan belanja modal juga dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rano Asoka pada Belanja Modal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dalam tingkat efektivitas pengelolaan laporan realisasi anggaran belanja modal di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dari 2016-2018 dapat dikatakan efektif dilihat dari indikator pendekatan.

IV. Kesimpulan

Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sudah efektif dibuktikan dalam dimensi yang terpenuhi Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap, Perencanaan Yang Matang, Penyusunan Program yang Tepat, Sistem Pengawasan dan Pengendalian.

Hambatan pelaksanaan belanja modal yang disebabkan karena pandemi Covid-19 yang malanda dunia maupun Indonesia. Tentunya hal ini menyebabkan perubahan kebijakan yang menyebabkan anggaran Belanja Modal harus di *refocussing* dan realokasi yang menyebabkan penundaan pengadaan aset tetap pada Pemerintahan Kota Bengkulu.

V. Ucapan Terimakasih

Ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dalam pikiran dan hati saya pada penulisan ini. Serta terimakasih yang tak terhingga kepada dua orang yang menjadi bagian dari hidupku yaitu kedua orang tua saya Bapak Kolper Siregar dan Emmy Rajagukguk serta saudara-saudara saya Alan Fernando dan Vetersia Rega. Ucapan juga kepada kepala BPKAD serta jajaran dalam penyusunan penulisan saya ini. Kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Tumija, S.Pd, M.M serta Dosen Pembimbing 2 saya Bapak H. Umuh Muchidin, S.E, M.Si yang selalu membimbing serta orang-orang yang mendukung saya selalu.

VI. Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, dkk. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Gerungan, Sylvia Febriany, dkk. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Karianga, Hendra 2017 : Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik. Kencana : Jakarta
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2017. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Moh. Khusaini. 2019. Keuangan Daerah. Universitas Brawijaya Press : Malang
- Nafarin, M 2007 : Penganggaran Perusahaan (Edisi 3. Penerbit :Salemba Empat : Jakarta
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Renyowijoyo Muindro. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 3. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sandu Siyoto & M. Ali Sodik. (2015). Dasar metodologi penelitian. Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan
- Yusuf, Muri. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 3(1), 9–19. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>